

Executive Summary

**PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA
PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO
(STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN)**

Oleh:
Humphrey Wangke
Adirini Pujayanti
Lisbet

Pusat Penelitian BKD DPRRI

2017

A. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja 2014-2019 mencanangkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Dalam upaya tersebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya melaksanakan kebijakan pembangunan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur negara, baik itu pusat maupun daerah.

Di tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Program Gerbang Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas) dengan fokus pada pembangunan di kawasan perbatasan. Program Gerbang Duta merupakan program pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dilaksanakan dilaksanakan secara bersama – sama oleh tidak kurang dari 18 Kementerian, dan 12 Gubernur di kawasan perbatasan. Program Gerbang Dutas dilakukan dalam satu paket meskipun ditangani secara berbeda oleh setiap Kementerian. Saat ini terdapat 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (LOKPRI) Pengelola Perbatasan Negara tahun 2015-2016.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengeluarkan Inpres No 6 Tahun 2015 dengan membangun 7 pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di 3 provinsi (Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua). Pemerintah melalui kementerian PU dan PR sejak Desember 2015 telah memulai sebuah program baru yaitu Pengembangan Infrastruktur dan Permukiman (PIP) di perbatasan. PIP ini dibangun bersamaan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diharapkan arus lalu lintas orang dan perdagangan akan semakin meningkat, kualitas permukiman dan perekonomiannya akan tumbuh bersamaan. Presiden Joko Widodo adalah memutuskan bahwa pengelolaan PLBN tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah tetapi diubah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu semua perangkat pengelolaan menjadi perangkat pemerintah pusat.

Pulau Kalimantan, merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, Utara dan Timur, sehingga persinggungan kepentingan antara kedua negara di pulau ini kerap terjadi. Di perbatasan Indonesia – Malaysia, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki target wilayah perbatasan Indonesia harus tampak lebih baik dari Malaysia. Sebagai tindak lanjut di Provinsi Kalimantan Barat dibangun 3 PLBN masing-masing di Aruk (Kabupaten Sambas), Entikong (Kabupaten Sanggau), Nangau Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Target lain pembangunan perbatasan Indonesia- Malaysia di Kalimantan

adalah melepaskan ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan Kalimantan terhadap Malaysia. Kedua negara telah membuat perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Sosek Malindo pada tahun 1967, yang merupakan forum kerjasama di bidang sosial ekonomi.

Dengan kondisi seperti itu, penelitian ini hendak meneliti upaya pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan secara terpadu agar dapat berfungsi khusus sebagai wilayah terdepan (*froitera*) dengan kebijakan pembangunan *outward looking*. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*) akan diperkuat dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Beberapa pertanyaan penelitian yang akan berusaha dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasinya masalah kesejahteraan dan sosial politik di perbatasan?
2. Bagaimana penanganan keamanan di perbatasan setelah dibentuknya PLBN?

B. Metode Penelitian

Data hasil penelitian lapangan dikumpulkan utamanya melalui wawancara dengan didukung observasi, studi literatur dan dokumen. Penentuan narasumber penelitian dilaksanakan melalui teknik *purposive sampling*.¹ Materi wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan dan diajukan kepada informan secara tatap muka terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan, wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

Didalam penelitian ini, peneliti mengunjungi kawasan perbatasan. Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara.

Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya.

¹ *Ibid*

Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini diadakan di dua provinsi yaitu Kalimantan Barat tanggal 10-16 Juli 2017 dan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 24-30 Juli 2017.

C. Hasil Penelitian

I. Kebijakan Outward Looking Kawasan Perbatasan Di Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Pengelolaan perbatasan wilayah merupakan sebuah pekerjaan yang tiada akhir selama negara tersebut berdiri. Oleh sebab itu kawasan perbatasan memerlukan mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan akan selalu terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan negara tetangga, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu penting bagi kedua negara bertetangga untuk bekerjasama. Penataan wilayah perbatasan antar dua negara tidak mungkin dilepaskan dari penataan kesepakatan-kesepakatan yang melibatkan kedua negara. Berbagai kepentingan dan persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dan di sepanjang garis batas selalu memiliki keterkaitan kepentingan dengan wilayah di seberang garis batas yang memisahkan keduanya.

Kerjasama pengelolaan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia menyimpan potensi permasalahan berupa perbedaan kondisi sosial ekonomi antara wilayah kedua negara. Sementara secara sosial budaya, masyarakat di wilayah kedua negara memiliki ikatan kekerabatan yang erat.² Kawasan pedalaman perbatasan Indonesia saat ini masih rawan terhadap berbagai kegiatan ilegal, kondisi tersebut diperburuk dengan lambannya pembangunan sosial ekonomi di perbatasan Indonesia. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan masih tingginya ketergantungan ekonomi sosial masyarakat perbatasan Indonesia di Kalimantan terhadap Malaysia. Keadaan ekonomi yang tertinggal bukanlah situasi yang sangat khusus, karena keadaan serupa dapat ditemui di daerah lain yang bukan perbatasan. Namun wilayah perbatasan mempunyai arti penting tersendiri karena dari aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan berkaitan dengan kedaulatan nasional suatu bangsa. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka

² Budi Hermawan Bangun, Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat-Sarawak (Suatu Studi Perbandingan), *Jurnal Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, h. 31-39

pemerintah Republik Indonesia memformulasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah perbatasan. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan arah kebijakan pembangunan *outward looking*.

1. Kesejahteraan Pendukung Keamanan Perbatasan

Penguatan keamanan di wilayah perbatasan harus didukung dengan peningkatan kesejahteraan. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Selain pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian, perlu disegerakan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Adanya 3 PLBN di Kalimantan Barat (Aruk, Entikong dan Nanga Badau) harus diikuti peraturan legalitas pendukungnya. Regulasi pendukung transaksi perdagangan, kode pelabuhan internasional oleh Kementerian Perhubungan, ketentuan impor produk tertentu oleh Kementerian Perdagangan dan gudang/terminal barang. Berlakunya penerapan *single document* oleh pabean, penetrasi terhadap kebijakan perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan SOSEKMALINDO dan BIMP-EAGA yang dirasakan masih lemah.

Peningkatan potensi SDM dengan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan dengan memperhatikan potensi SDM setempat dengan memperbaiki dan meningkatkan pendidikan masyarakat sejalan dengan pembangunan infrastruktur perbatasan.

2. Respon Positif Malaysia terhadap Kebijakan Perbatasan

Kesungguhan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun kawasan perbatasan mendapat tanggapan positif dari pihak Malaysia. Malaysia menyadari bahwa kemajuan pembangunan ekonomi di wilayah Sabah dan Serawak tidak dapat terlepas membaiknya kondisi perekonomian dan kesejahteraan di kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua pihak memiliki saling ketergantungan, oleh karena itu kedua pihak harus

lebih saling memahami, lebih saling mengakomodasikan dan saling berusaha menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.³ Hal ini harusnya segera ditindaklanjuti dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA secara integratif dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.⁴ Penerapan gagasan tata kelola lintas perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* bersama-sama dengan ASEAN Connectivity ini pada akhirnya menggeser corak hubungan intra ASEAN dari corak kesetiakawanan maupun saudara serumpun, menjadi corak “mitra bisnis”.⁵

Kebijakan pembangunan perbatasan dengan paradigm outward looking di perbatasan Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan Malaysia, perlu ada koordinasi dengan negara yang menjadi negara mitra pembangunan Indonesia tersebut. Dalam perdagangan bilateral di perbatasan kedua negara ini berlaku mekanisme pasar, B to B dan P to P. Posisi Indonesia sebagai konsumen produk Malaysia kurang menguntungkan, Pemerintah Indonesia perlu lebih kreatif dalam mencari peluang ekonomi yang mampu menarik pembeli dari Malaysia. Saat ini PLBN Entikong lebih banyak memberi manfaat bagi Malaysia dengan antusiasnya WNI ke Malaysia untuk berbelanja, wisata maupun berobat. Hal tersebut belum sebanding dengan minat WN Malaysia ke Indonesia. Tanpa adanya azas manfaat yang dirasakan WN Malaysia mereka tidak merasa berkepentingan sehingga belum banyak memanfaatkannya 3 PLBN baru di Kalimantan Barat.

3. Upaya Melepaskan Ketergantungan dari Malaysia

Daerah perbatasan dianggap memiliki potensi besar sebagai daerah pengekspor pangan lokal ke negara-negara tetangga Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya kementerian pertanian, berencana menjadikan kawasan perbatasan Kalimantan sebagai lumbung pangan. Program lumbung pangan perbatasan yang sejauh ini masih berupa wacana karena belum ada regulasi lanjutan antara

³ Abdul Rahim Anuar, Rubrik Pembangunan Pekan Sempadan Malaysia-Kalimantan: Tawau-Pulau Nunukan Development Rubrics Of Malaysia-Kalimantan Border Towns: Tawau-Nunukan Case Study , *Journal Of Borneo Social Transformation Studies* (Jobsts), Vol. 1, No. 1, 2015 Issn 2462-2095 Universiti Malaysia Sabah, h. 1-17.

⁴ Aryono Putra, “Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau)”, *Jurnal Hukum Universitas Borneo Tarakan IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015 , h. 308 – 326.

⁵ *Saptopo B Ilkodar*, Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 2, November 2012 h. 110-124.

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mengenai aturan perdagangan beras di perbatasan.⁶

Kawasan perbatasan masih dipengaruhi oleh ketergantungan pasokan kebutuhan sehari-hari dari Malaysia. Hal ini membuat kehidupan masyarakat perbatasan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di negara tetangga tersebut. Upaya melepas ketergantungan ekonomi dari Malaysia ini diatasi oleh Pemda Kalimantan Utara dengan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk barang kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman perbatasan. Sedangkan untuk tahun 2018 Pemda Kaltara telah mengusulkan pembangunan pasar berupa toko Indonesia melalui anggaran APBN (DAK Fisik) untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Toko Indonesia tersebut akan menyediakan dan menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan dengan menggandeng pihak Bulog.⁷ Toko tersebut diharapkan juga dapat menjadi pusat penjualan hasil industri UMKM warga setempat untuk dibantu pemasarannya ke luar daerah, termasuk dalam hal ini beras Krayan.

4. Otonomi Khusus Perbatasan

Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan upaya pemekaran daerah terutama di kawasan pedalaman perbatasan Kalimantan ini. Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial tidak mudah dilaksanakan. Dalam upaya mengatasi hambatan administrasi kependudukan dan mengurangi defisit anggaran kecamatan daerah pedalaman perbatasan upaya pemekaran daerah patut dipertimbangkan. Pemekaran daerah perbatasan diharapkan akan membantu wilayah ini untuk dapat berkembang lebih pesat sangat potensial. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah agar program pemekaran ini didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat di perbatasan agar mereka bersedia untuk melaksanakan program pembangunan bersama pemerintah. Terutama dalam program pengembangan potensi sumber daya ekonomi

⁶ Wawancara dengan Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA, Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 28 Juli 2017 di Tanjung Selor.

⁷ Wawancara dengan Hartono, Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada tanggal 29 Juli 2017 dan wawancara dengan Hariati,Kepala Sub Bagian Program Perencanaan dan Edi Prianto Kepala Sub Bagian Keuangan pada tanggal 27 Juli 2017 di Tanjung Selor.

yang sangat potensial, agar kemudian masyarakat perbatasan tidak lagi terlalu tergantung pada suplai barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangga Malaysia.

Dengan dihapusnya BNPP daerah maka tupoksinya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Perlu dilakukan sinergi pelimpahan kewenangan dan proses transisi dari BNPP kepada PLBN. Bagi Pemda Kalimantan Barat kondisi saat ini seperti membuka gerbang perbatasan namun regulasi dari pemerintah pusat belum jelas. Upaya pembangunan dari pinggiran negara tidak terjadi karena penguatan kelembagaan di daerah tidak ada. Pemerintah Pusat perlu perumusan kembali kebijakan ini karena menimbulkan pertanyaan untuk siapa pembangunan perbatasan ini dilakukan. Daerah perlu lebih dilibatkan karena masyarakat di perbatasan adalah garda terdepan penjaga perbatasan oleh karena itu perlu sinergi politik, keamanan dan hukum dengan Pemda.⁸

II. Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo Di Provinsi Kalimantan Barat Dan Utara

1. Perkembangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Terkait Perbatasan

Selama ini, pengelolaan masalah lintas batas dilakukan dengan membangun mekanisme kerjasama bilateral.⁹ Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi persoalan pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan agar tercipta kondisi keamanan yang kondusif. Sampai saat ini, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia terkait keamanan perbatasan telah berjalan baik. Hal ini dapat kita lihat dari kerjasama dan pertemuan UCM (*Unit Commander Meeting*), TPOD (*Tim Perancang Operasi Darat*), COCC (*Coordinated Operation Control Committee*), dan lain sebagainya.

Disamping itu perlu adanya perwakilan antara pihak antara Malaysia dan Indonesia untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi diantara kedua negara.¹⁰ Kendati demikian, apabila terkait dengan masuknya barang-barang ilegal dan terlarang seperti barang-barang kebutuhan pokok yang dimasukkan secara tidak resmi dan penyelundupan narkoba, kerjasama Indonesia dan Malaysia masih perlu ditingkatkan kembali.¹¹

⁸ FGD penelitian dengan Bappeda dan SKPD Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2017

⁹*Ibid.*

¹⁰Jawaban tertulis dari Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura tanggal 11 Juli 2017 di Pontianak.

¹¹Jawaban Tertulis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tanggal 12 Juli 2017 di Pontianak.

2. Pos Lintas Batas Negara Di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Upaya Pemerintah dalam membangun Pos Lintas Batas Negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah untuk membangun perbatasan sebagai “beranda/teras” terdepan Indonesia. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut seharusnya juga didukung dengan situasi kondisi keamanan yang kondusif. Menjaga situasi keamanan dan ketertiban dikawasan perbatasan agar tertib dan kondusif juga menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sebagai indikator keamanan maka statistik kriminal perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum.

3. Persoalan Keamanan Di Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia

Kondisi geografis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat yang banyak berlintasan dengan hutan maupun perkebunan kelapa sawit membuat TNI AD kesulitan dalam menempatkan titik-titik pos keamanan sehingga banyak terdapat jalan tikus untuk penyelundupan narkoba di kawasan tersebut. Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu kawasan perbatasan yang rawan terhadap ancaman keamanan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya-upaya mengatasi persoalan keamanan tersebut karena apabila persoalan tersebut tidak diatasi dengan baik maka dapat berpotensi untuk menggerus kedaulatan negara Indonesia.¹²

Pihak TNI-AD memahami betul bahwa menjaga perbatasan serta mendorong perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan merupakan tugas TNI-AD. Bahkan, program prioritas TNI di kawasan perbatasan adalah pengamanan wilayah untuk menjaga kedaulatan. Salah satu tujuannya adalah agar wilayah perbatasan tidak dijadikan lalu lintas barang dan orang secara illegal, baik dari negara tetangga maupun dari wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk perkembangan ekonomi di kawasan perbatasan.¹³

D. Penutup

Upaya mewujudkan kesejahteraan di wilayah perbatasan itu harus bermuara kepada tujuan utama dibentuknya negara, yakni terjaganya kedaulatan teritorial negara

¹²*Ibid*, halaman 65-66.

¹³“Kebijakan Pertahanan Dukung Ekonomi”, *Kompas*, 2 Maret 2017, halaman 4.

dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka harus ada kesungguhan dan niat politik [*political will*] dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan wilayah perbatasan tersebut dan dengan keterlibatan seluruh warga negara Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, negara tidak mungkin dapat bekerja sendiri menghadapi wilayah perbatasan Indonesia yang demikian tersebar luas.

Kebijakan *outward looking* yang dilaksanakan Pemerintah Presiden Joko Widodo memberi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Namun penerapan yang bersifat *top down policy* ini menjadikan beberapa program pembangunan kawasan perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat. Dalam upaya pembangunan perbatasan yang lebih optimal, masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian agar tujuan utama dari kebijakan pembangunan dapat diwujudkan, maka perlu adanya perbaikan strategi dan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan proses pembangunan di daerah perbatasan. Pemerintah pusat perlu menerapkan model pembangunan yang lebih partisipatif dan memberikan ruang kepada masyarakat di daerah untuk terlibat dalam pembangunan daerah perbatasan.

Pada era Presiden Joko Widodo, pengelolaan keamanan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Utara, sudah berjalan dengan baik karena sudah banyak terdapat upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, melakukan kegiatan-kegiatan patroli untuk pengamanan. Adanya bangunan PLBN beserta aparat-aparat pemerintah yang bertugas di dalamnya, seperti aparat Bea Cukai (*Custom*), imigrasi (*Immigration*), karantina (*Quarantine*), dan keamanan (*Security*), merupakan suatu wujud “eksistensi/keberadaan” negara di kawasan perbatasan sehingga menambah posisi tawar Indonesia dalam kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia juga dapat meningkat. Tidak hanya itu saja, dengan adanya PLBN juga telah membuat tingkat kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan para pengguna Pas Lintas Batas menjadi lebih baik sehingga diharapkan ke depannya upaya penyelundupan pun dapat diminimalisir.

Kendati demikian, masih saja terjadi kasus penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Utara. Hal ini

dikarenakan penyelundupan narkoba tersebut lebih banyak terjadi di jalur-jalur tikus yang terdapat di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat menutup jalur-jalur tikus yang terdapat di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia karena letak geografisnya yang sulit untuk ditempuh.

Untuk mengatasi hal tersebut sudah terdapat program Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk menempatkan TNI di perbatasan, khususnya di titik-titik di perbatasan Indonesia-Malaysia yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program ini juga memiliki kendala-kendala yang perlu diatasi agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Program ini patut diapresiasi dan didukung oleh DPR-RI agar program tersebut dapat cepat terlaksana sehingga dapat meminimalisir adanya penyelundupan-penyelundupan ataupun tindakan ilegal yang dilakukan melalui jalur-jalur tikus tersebut di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan demikian kondisi keamanan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Utara pun dapat terjaga dengan baik.